

# **Strategi Pembangunan Kehutanan di Tanah Papua: Konsep Sosial Budaya Masyarakat**

**Oleh**

**Susan T. Salosa**

**Balai Penelitian Kehutanan Manokwari Papua**  
Jln. Inamberi Pasir Putih, Manokwari, email: [susan\\_3sa@yahoo.com](mailto:susan_3sa@yahoo.com)

## **I. Pendahuluan**

Lebih dari 250 suku asli dengan ragam bahasa dan budayanya masing-masing hidup di tanah Papua. Kehidupan masyarakat umumnya lekat dengan hutan karena tanah Papua dengan luas 31 juta ha, 75 % diantaranya adalah hutan. Pemanfaatan sumber daya alam hutan dilakukan oleh masyarakat menurut kearifan tradisional mereka secara turun-menurun. Hutan merupakan tempat mencari makan, berburu, meramu, mencari bahan-bahan budaya, bahan bangunan dll. Keberadaan suku-suku ini pun memiliki hubungan yang tersendiri dengan hutan dan alam sekitarnya dalam membentuk cara hidup dan cara berpikir mereka.

Konsep hutan dalam masyarakat Papua adalah ibu yang bertugas memberi makan/menyusui anak-anaknya. Hutan adalah penyedia pangan, bahan konstruksi dan bahan-bahan lain yang diperlukan masyarakat. Hutan juga adalah dapur hidup (*Ayamfos*) bagi masyarakat di TWA Gunung Meja Manokwari (Anonymous, 2006). Dalam kehidupan masyarakat Papua, keberadaan dapur yang merupakan inti dari sebuah rumah karena menjadi bagian terbesar pada sebuah rumah masyarakat Papua. Dapur adalah tempat memproses makanan, tidur, berdiskusi, bercengrama dan lain sebagainya

karena di bagian tersebut terdapat perapian yang berfungsi untuk memasak dan menghangatkan seluruh ruangan dalam rumah.

Hutan memiliki peran yang penting bagi masyarakat menurut sosial budayanya. Pembangunan Kehutanan di Papua memerlukan strategi yang tepat sehingga tujuan mulia untuk mendapatkan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera dapat diperoleh.

### **I. Pengelolaan hutan di daerah**

Papua memiliki beberapa tipe ekosistem yakni pegunungan, dataran rendah, rawa dan lereng gunung. Menurut Mansoben (2004) *dalam* Mulyono (2012) tanah Papua dibagi dalam 4 (empat) lingkungan atau zona ekologi utama yang berpengaruh terhadap ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Papua yaitu (1) zona ekologi rawa (swampy areas), daerah pantai dan muara sungai (coastal dan riverine), (2) zona ekologi daerah pantai (coastal lowland areas), (3) zona ekologi kaki gunung serta lembah-lembah kecil (foothills and small valleys) dan (4) zona ekologi pegunungan tinggi (highlands). Dengan zona ekologi yang berbeda ini tentu saja pola hidup dan ketergantungan masyarakat dengan alam berbeda satu dengan lainnya. Begitu pula pola konsumsi dan mata pecaharian utama masyarakat juga berbeda.

Masyarakat Papua mengenal beberapa jenis sumber pangan utama dari mengkonsumsi keladi (*Colocassia sp.*), ubi jalar (*Ipomoea batatas*), sagu (*Metroxylon sp*), singkong (*Manihot utilisima*) dan pisang (*Musa sp*). Masyarakat

di daerah pegunungan tinggi mengkonsumsi keladi dan singkong sebagai makanan pokok walaupun tetap didukung oleh sumber pangan yang lain. Masyarakat kaki gunung umumnya mengkonsumsi keladi, singkong dan sagu (bila memungkinkan untuk mengambil dari lembah). Sementara untuk masyarakat ekologi rawa dan pantai, makanan pokoknya adalah sagu. Mata pencaharian juga berbeda antara zona ekologi yakni masyarakat yang hidup di pegunungan umumnya adalah petani dan pemburu, sedangkan yang hidup di daerah tepi pantai umumnya adalah nelayan.

## **II. Penerimaan terhadap informasi/tehnologi baru**

Kemampuan masyarakat dalam mengolah informasi dan tehnologi baru dipengaruhi oleh beberapa hal yakni tingkat pendidikan, jarak wilayah terhadap akses informasi, adat istiadat, sarana prasarana telekomunikasi yang tersedia di dalam kampung dan hubungan interpersonal. Masyarakat di pedesaan rata-rata berpendidikan rendah karena yang berpendidikan tinggi (SMA ke atas) lebih memilih untuk menetap dan berkarir di kota.

Jarak kampung terpencar dan jauh ke pusat informasi menjadikan program atau rencana yang ingin diimplementasikan perlu diklarifikasi berulang kali karena ketidakjelasan program di masyarakat. Keterbukaan masyarakat terhadap Informasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan mereka terhadap hal-hal baru. Pendekatan kepada para tetua adat, kepala suku dan Baperkam sangat berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat. Para

tetua adat dan kepala suku masih sangat dihormati oleh masyarakat sehingga informasi yang diperoleh bisa dengan mudah diikuti. Timbulnya reaksi-reaksi bahkan konflik dalam masyarakat bermula dari komunikasi dan hubungan yang buruk. Orang Papua juga sangat menghargai hubungan kekerabatan dan hubungan informal lainnya. Ketika seseorang yang notabene bukan orang asli setempat dapat hidup bersama dan berinteraksi dengan baik dengan tokoh adat maka program yang disampaikan akan dapat terlaksana. Apalagi bila sudah tercipta kepercayaan (*trust*) di antara pengusaha hutan dan masyarakat.

### **III. Kearifan lokal**

Keberadaan hutan dan alam sekitar melahirkan pengetahuan karena ada proses belajar-mengajar antara orang tua kepada anak dan dari generasi tua ke generasi muda. Ketika hutan rusak maka proses transfer kearifan lokal berubah karena kearifan lokal melahirkan pengetahuan lokal yang lahir sebagai hasil dari perpaduan antara ketergantungan kehidupan dan integrasi budaya.

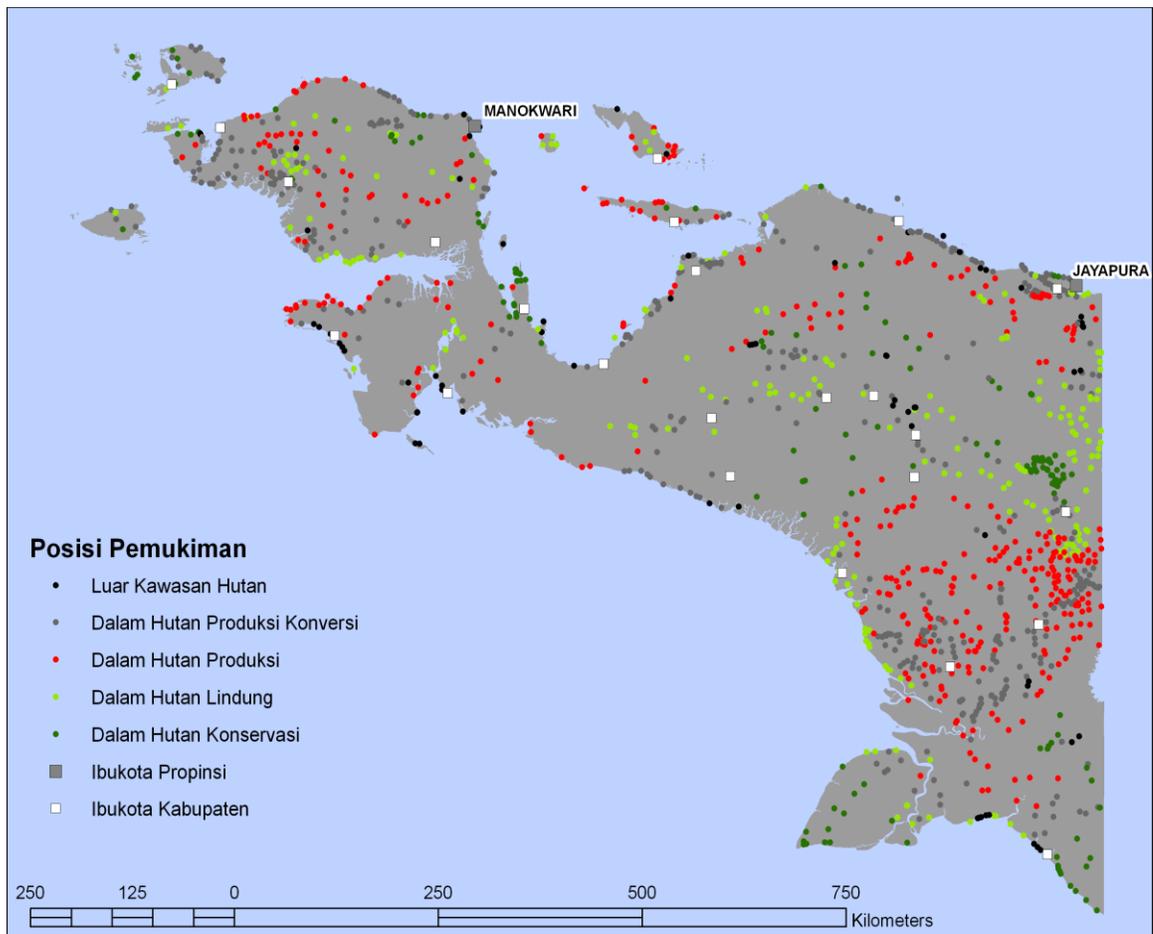
Kearifan lokal yang mendasari pelestarian hutan adalah:

1. Kepercayaan dan/atau pantangan yang meliputi
  - Waktu penanaman yang hanya berlaku pada waktu tertentu.
  - Hutan adalah ibu atau dapur hidup yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat.
2. Etika dan aturan: batasan dalam pengelolaan hutan antara batas kebun, ataupun batas wilayah antar clan.

3. Teknik dan Teknologi: Menentukan waktu mulai penanaman dengan melihat pertumbuhan jenis tanaman tertentu dan mengolah tanah dengan cara yang paling tradisional yaitu membiarkan babi mencungkil tanah dan memakan umbi di dalam tanah sekaligus menggemburkan tanah.

4. Praktek dan Tradisi Pengelolaan Hutan/lahan

Menetapkan batas-batas pengelolaan hutan mulai dari *susti*, *bahamti* dan *nimahamti* serta membudidayakan jenis tanaman (domestikasi) jenis tanaman hutan seperti kelapa hutan.



Sumber: Kapisa, 2010

Masyarakat sekitar hutan sudah seharusnya dapat menikmati keberadaan hutan dengan memanfaatkan sumber kayu dan non kayu yang ada. Keberadaan peraturan perundangan yang menjadikan hutan sebagai salah satu sumber kekayaan dan sumber daya yang dilindungi menjadikan kedudukan masyarakat pemilik ulayat dan masyarakat adat menjadi tidak jelas.

Dalam pengelolaan hutan para akademisi berkeyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan sendirinya bila rekayasa teknis pelestarian hutan berhasil dicapai (Sardjono, 2004). Hal ini menyebabkan fokus utama dari pengelolaan hutan adalah pengelolaan hutan yang baik menurut sistem pengelolaan yang ada dan teruji contohnya sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan masyarakat menjadi hasil yang secara tidak langsung (*indirect*) diperoleh ketika semua sistem ini sudah berjalan dengan baik, jadi mereka bukan bagian yang menentukan keberhasilan. Hal ini tentu perlu ditinjau kembali mengingat tingkat keberhasilan yang diperoleh masih dalam nuansa “abu-abu” (tidak jelas). Masyarakat selalu merasa dalam posisi yang dikorbankan.

Pada masyarakat Papua yang masih sangat sederhana, hutan dipandang sebagai tempat yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena mereka hanya bertani subsisten dan meramu. Namun sejalan dengan perkembangan yang terjadi dan peningkatan kebutuhan ekonomi sehingga hutan dan hasil hutan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Suatu wilayah yang sebelumnya dapat diusahakan secara bersama-sama (*communal*)

sekarang memiliki nilai ekonomi tinggi dan harus dimanfaatkan sesuai dengan kepemilikannya. Dengan demikian penentuan batas wilayah antar suku, kampung dan clan sangatlah penting.

Batas wilayah clan biasanya ditentukan menurut (1). Kesepakatan bersama, (2). Batas pohon besar, jenis tanaman tertentu seperti pohon matoa yang besar, batu atau sungai, (3). Batas patok yang dikuatkan dengan surat bukti pelepasan tanah yang disahkan oleh pemilik wilayah.

#### **IV. Strategi Pembangunan Kehutanan di Tanah Papua**

Program pembangunan Kehutanan perlu memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Pemanfaatan hutan merupakan perwujudan dari nilai sosial-budaya yang kuat dalam masyarakat lokal seperti dalam pemanfaatan sagu karena berperan dan berfungsi untuk mengatur dan mengikat komunitas melalui berbagai mekanisme budaya dan manajemen kearifan lokal yang dibentuk karena proses kehidupan yang panjang serta pemahaman masyarakat terhadap lingkungannya (Numberi, 2011).

Dalam pemanfaatan hutan dikenal beberapa kelompok dalam masyarakat yang menuntut hak atas tanah:

1. Tuntutan atas dasar kepemilikan yakni masyarakat menuntut karena merasa bahwa mereka adalah pemilik hak ulayat yang sah.
2. Tuntutan atas dasar nilai budaya yang penting dimana terdapat kearifan lokal atas pemanfaatan sumber daya alam. Hutan dan areal yang

dikeramatkan karena memiliki kelebihan/kekhususan berbeda dengan tempat lain di wilayah tersebut. Contohnya areal hutan keramat di kawasan konsesi kampung Sararti yang dilindungi oleh masyarakat karena memiliki kekhususan yang berbeda dengan tempat lain di wilayah tersebut yakni keunikan batu yang dapat mengeluarkan api ketika digesekkan satu sama lain.

3. Tuntutan atas dasar daya dukung hutan (tanah) secara ekonomi.

Ketika hutan memiliki kandungan hasil hutan dengan harga yang tinggi, masyarakat menuntut untuk dibayar dengan penggantian yang sesuai. Bahkan hutan tersebut enggan diberikan bagi pengusaha HPH untuk dikelola karena akan merusak potensi yang ada dan membuat hewan buruan menjauh. Masyarakat memilih untuk mendapat dana tunai dibandingkan dalam bentuk program karena lebih dapat dimanfaatkan secara pribadi dan langsung.

Ketika program hendak dilaksanakan sebaiknya diinformasikan lewat pimpinan adat yakni kepala suku karena masyarakat adat umumnya lebih mendengar kepada para tetua dat dibandingkan baperkam. Kegiatan yang bersifat komunal dan untuk kepentingan komunal masih lebih diutamakan karena adanya budaya gotong royong dan kekeluargaan yang masih dijunjung tinggi. Sebaliknya yang dibutuhkan oleh masyarakat dari pemerintah adalah:

1. Keterbukaan tentang proyek/kegiatan yang sedang dilaksanakan.
2. Kejelasan peran dan keterlibatan para pihak termasuk kekuatan hukumnya

3. Tujuan yang hendak dicapai/ hasil yang akan diperoleh.
4. Bagian (keuntungan) yang akan diperoleh masyarakat

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa demi mencapai keberhasilan program maka:

1. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan
2. Ada kepastian hukum yang jelas
3. Mengutamakan kepentingan masyarakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
4. Untuk keberhasilan proyek penanaman sebaiknya menggunakan jenis tanaman lokal yang sesuai. Seperti contohnya *Calophyllum inophyllum* pada HTR Biak (Yeny dkk, 2011)

Kesenjangan yang selama ini terjadi antara pengusaha kayu dan masyarakat diduga terjadi karena ketidakjelasan mengenai pemanfaatan hutan dan insentif yang diterima oleh masyarakat. Pada kenyataannya akan terjadi tiga blok dalam masyarakat yaitu blok yang menerima, blok yang menolak, blok yang menolak tapi mau menerima fasilitas yang diberikan oleh perusahaan perusahaan kayu.

Identifikasi SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, and Threat*)

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Strength:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi sumber daya alam yang tinggi</li> <li>2. Punya kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan dan sumber daya alam lainnya</li> <li>3. Nilai kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi</li> <li>4. Keinginan untuk maju dan berkembang</li> </ol>	<p>Weaknesses:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas SDM yang masih rendah</li> <li>2. Sistem manajemen ekonomi yang masih rendah</li> <li>3. Jauh dari kota/transportasi mahal</li> <li>4. Topografi wilayah yang berat</li> <li>5. Belum ada tata batas kepemilikan yang jelas</li> </ol>
<p>Opportunis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat diutamakan dalam pembangunan sejalan dengan Otsus</li> <li>2. Kemungkinan pemekaran wilayah administratif</li> <li>3. Peningkatan sarana prasarana dan media informasi</li> <li>4. Perdasus dan Perdasi Papua</li> <li>5. Keterlibatan parapihak dalam pengelolaan hutan Papua</li> </ol>	<p>Strategy (SO)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi sumber daya alam yang tinggi didukung dengan kearifan local dalam memanfaatkan sumber daya alam termasuk nilai kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi serta keinginan untuk maju dan berkembang dalam semangat otonomi khusus maka hutan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat lokal dan semua pihak</li> </ol>	<p>Strategy (WO)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas SDM lewat pendidikan dan pelatihan</li> <li>2. Penataan batas ulayat yang jelas</li> </ol>
<p>Threats:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan status kawasan hutan menjadi daerah pemekaran baru sehingga hutan</li> </ol>	<p>Strategy (ST)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan berdasarkan Perencanaan wilayah dan penataan batas wilayah dengan baik</li> </ol>	<p>Strategy (WT)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan usaha pemberdayaan dan pembinaan masyarakat melalui program</li> </ol>

<p>rusak.</p> <p>2. Sempitnya lahan berusaha karena penambahan jumlah penduduk</p> <p>3. Kebijakan pemerintah pusat</p>	<p>2. Pembukaan lapangan kerja baru.</p>	<p>pendampingan.</p> <p>2. Menataan batas ulayat yang jelas</p>
---	--	---

## **V. Kesimpulan**

1. Bagi masyarakat Papua, hutan merupakan salah satu kekayaan sosial budaya karena pemanfaatan dan proses sosial budaya yang terjadi di dalamnya.
2. Strategi yang tepat bagi pembangunan kehutanan di tanah Papua adalah dengan komunikasi yang jelas, melibatkan masyarakat dalam kegiatan, ada insentif yang memadai sebagai penghargaan atas hak atas tanah.
3. Hutan yang kaya di wilayah ulayat masyarakat dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia mengakibatkan hasil yang diperoleh tidak maksimal karena itu perlu peningkatan kualitas SDM lewat pendidikan dan pelatihan.
4. Perlu penataan batas wilayah dan perencanaan pembangunan yang memadai sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan hutan.

## Daftar Pustaka

- Anonimous. 2006. Potensi Biofisik Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Gunung Meja Manokwari. ISBN 979-25-3334-6. Balai Penelitian Kehutanan Manokwari.
- Kapisa, N. 2010. Intergrasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Papua (*Integration of the Forest Management Unit within Sustainable Forest Management Policy in Papua*). Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Papua.
- Mulyadi. 2012. Budaya Pertanian Papua: Perubahan Sosial dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Arfak. KartaMedia. Yogyakarta.
- Number, F. 2011. Sagu: Potensi yang Masih Terabaikan. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta Barat.
- Sardjono, M. A. 2004. Mozaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumber Daya. Debut Wahana Sinergi. Jogjakarta.